

Siaran Pers

MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS: PENURUNAN PREVALENSI STUNTING PROYEK PRIORITAS NASIONAL

Jakarta, Selasa 3 April 2018 – Kementerian PPN/Bappenas mencatat 9 juta anak mengalami *stunting* yang tersebar di pedesaan maupun perkotaan. Dari sisi ekonomi, apabila terus dibiarkan *stunting* dapat merugikan ekonomi Indonesia. Diperkirakan *stunting* dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara sebesar 2-3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Jika PDB negara kita Rp 13.000 triliun pada 2017, maka diperkirakan potensi kerugian akibat *stunting* dapat mencapai Rp 300 triliun per tahun. Besarnya potensi ancaman *stunting*, mendorong pemerintah sejak awal berkomitmen penuh serius menangani permasalahan *stunting*. Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S Brodjonegoro dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah telah menargetkan penurunan *stunting* pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta) dari 32,9 persen di 2013 menjadi 28 persen di 2019, sementara di dalam RKP 2018 pemerintah telah menjadikan penurunan *stunting* sebagai salah satu Proyek Prioritas Nasional. “Dengan komitmen seperti itu, diharapkan SDM Indonesia mampu bersaing di era ekonomi digital yang memerlukan penguasaan teknologi dan *skill* yang tinggi, serta memutus rantai kemiskinan antar-generasi,” tutur Bambang.

Saat ini, kondisi *stunting* pada balita Indonesia terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi. Pemerintah menetapkan 100 kabupaten prioritas untuk pengurangan angka *stunting*. Selanjutnya, ada 200 kabupaten lagi yang akan ditangani. *Stunting* tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah mencapai 16,9 persen dan terendah ada di Sumatera Utara dengan 7,2 persen. Secara nasional, *stunting* rata-rata terjadi hingga 10,2 persen dan menyebar di seluruh wilayah dan lintas kelompok pendapatan.

Sebelumnya, dalam rangka meningkatkan komitmen dan kapasitas daerah serta para pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten/kota, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan acara ***Stunting Summit*** yang mengusung tema “***Bersama Cegah Stunting***” pada 28 Maret 2018, di Hotel Borobudur, Jakarta. *Stunting Summit* dihadiri 34 gubernur seluruh Indonesia, 100 bupati/walikota lokasi prioritas penurunan *stunting*, 33 bupati lokasi Proyek Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM), serta 100 kepala desa, dengan jumlah keseluruhan peserta *Stunting Summit* sebanyak 1.000 orang.

Stunting Summit merupakan pertemuan nasional yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Indonesia dalam rangka mendorong percepatan penurunan *stunting* di Indonesia. *Stunting Summit* menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk mencanangkan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi di kabupaten/kota prioritas, dan memperluas lokasi intervensi secara bertahap. “Sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden mengenai pentingnya mengatasi masalah *stunting* yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Agustus 2017 tentang RAPBN 2018, pemerintah melaksanakan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi yang difokuskan pada 100 kabupaten/kota pada 2018. Direncanakan, kegiatan ini diperluas mencakup 160 kabupaten/kota pada 2019, dengan menambahkan 60 kabupaten/kota terutama kabupaten-kabupaten di provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur,” jelas Menteri Bambang.

Stunting Summit juga sebagai forum bertukar pengalaman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki cerita sukses (*success stories*) dan praktek baik (*best practices*) dalam kegiatan penurunan *stunting* di daerah. Praktik baik dari kabupaten dipaparkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sintang Kalimantan Barat, dari dunia usaha

dipresentasikan oleh *SUN Business Network* Indonesia, dari organisasi masyarakat diwakili Ketua PP Fatayat NU dan NA Muhammadiyah, sementara dari mitra pembangunan disampaikan oleh *Nutrition Specialist* UNICEF. "Agenda pertemuan yang dimulai sejak pagi tadi menampilkan praktek baik penurunan *stunting* dari beberapa daerah yang dapat dijadikan pembelajaran untuk diadopsi atau direplikasi di daerah lainnya. Selain itu, K/L juga menyampaikan berbagai kegiatan untuk mendukung upaya penurunan *stunting* yang dapat disinkronkan dengan kegiatan daerah," kata Menteri Bambang.

Jakarta, 03 April 2018

Thohir Afandi
Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan
Kementerian PPN/Bappenas

Untuk informasi lebih lanjut:
Kementerian PPN/Bappenas
Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telepon: (021) 31936207, 3905650;
Faksimile: (021) 31901154
Email: humas@bappenas.go.id